

LAMPIRAN

LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA**Nama : Y.F. Sukasno, S.H.****Jenis Kelamin : Laki-laki****Jabatan / Unit Kerja : Ketua Komisi II dan Anggota Badan Anggaran /
DPRD Kota Surakarta****Hari dan tanggal : Rabu, 30 Oktober 2019**

- 1) Terkait dengan fungsi anggaran, apakah hubungan antara DPRD dengan eksekutif dalam penyusunan APBD 2017-2018 telah berjalan dengan harmonis? Pada posisi masing-masing pembahasan RAPBD menjadi APBD ditahun anggaran 2017-2018 sudah berjalan dengan baik, artinya berarti sekarang sudah selesai bahkan sekarang sudah ada P2APBD. Kalo dikatakan sesuai dengan fungsi masing-masing di eksekutif itu kan bagian merencanakan anggaran dalam perencanaannya mestinya mengakomodir hasil musrenbangkel, musrenbangcam dan musrenbangkot. Lalu ada forum SKPD yang diforum SKPD itu ada pokok-pokok pikiran DPRD masuk disana juga berdasarkan RPJMD itu semua menjadi dasar acuan eksekutif untuk merencanakan RAPBD di tahun 2018. Fungsi legislatif setelah itu semua direncanakan mestinya sesuai tahapannya yaitu secara singkatnya walikota menyampaikan nota pengantar APBD lalu ada proses pandangan fraksi, jawaban walikota, setelah itu dilanjutkan ditingkat pembahasan. Dimulai dari KUA-PPA setelah itu disetujui lalu dilanjutkan di pembahasan RAPBD nya dan kalau disana merencanakan, mestinya fungsi legislatif adalah pada persetujuan artinya apakah anggaran yang telah direncanakan dengan besaran anggarannya masing-masing artinya item APBD nya masing-masing sudah sesuai belum dengan perencanaan macam-macam dan legislatif akan mencermati proses itu. Kalau itu sudah sesuai dan kami menganggap itu memang skala prioritas maka legislatif akan melakukan persetujuan. Dan itu semua berjalan dengan baik dipencanaan dan fungsi legislatif sebagai yang menyetujui atau tidak itu sudah berjalan. Itu dibuktikan pada tahun 2018 pemerintah kota mendapatkan penghargaan WTP dari BPK.

- 2) Apakah dalam setiap tahapan penyusunan dan penetapan telah berjalan tepat waktu?

Jadi diaturan dimandatkan satu bulan sebelum akhir tahun anggaran, paling tidak November kalau persoalan tanggal itu tentative saja. Tapi sudah kami DPRD Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta persetujuan APBD selalu pada bulan November jadi tidak pernah lompat ke Desember.

- 3) Apakah ada indikasi mengenai terjadinya *slack* terhadap rancangan yang diusulkan eksekutif?

Slack tidak pernah. Tetapi kalau semua kebijakan yang tadi sudah disampaikan sudah sesuai, kalau kebijakannya kami setuju. Kebijakan itu kan perencanaan pada programnya. Nah program macam-macam itu kan ada RABnya, RABnya itu yang legislatif cermati artinya besaran volume atau besaran uangnya itu yang legislatif cermati, apakah terlalu besar ataukah kurang, belanja pegawai sudah sesuai belum dan sebagainya. Oleh karena itu permasalahan ketidaksempurnaan alokasi pasti ada pada eksekutif, karena eksekutif dalam perencanaan pembangunan kedepan hanya bisa memprediksi, sedangkan untuk kondisi realita kedepannya pasti juga ada ketidaksesuaian dengan yang diprediksi. Maka seperti yang sudah dijelaskan dalam perjalannya mereka punya prioritas, dan inilah fungsinya dewan untuk melakukan controlling dalam fungsi anggaran.

- 4) Apakah diantara DPRD dan Pemerintah Daerah merasa ada pihak yang lebih dominan?

Tidak ada pihak yang lebih dominan. Karena pada dasarnya kembali pada fungsi masing-masing, yaitu fungsi eksekutif merencanakan dan legislatif yang mencermati artinya mengambil kesimpulan apakah ini disetujui atau tidak. Setelah itu jika legislatif sudah setuju maka eksekutif akan melaksanakan sesuai yang disetujui. Tugas legislatif yang terakhir adalah kontrol. Artinya apakah yang kemarin direncanakan setelah kita bahas dan DPRD setuju setelah DPRD setuju kembali ke eksekutif dilaksanakan dan apakah sudah sesuai dengan apa yang DPRD setuju. Maka yang terakhir DPRD melakukan kontrol dalam perjalannya. Sehingga tidak pihak yang lebih dominan. Karena fungsinya telah berjalan sebagaimana mestinya.

5) Dinamika atau factor apa saja yang muncul selama pembahasan APBD?

Kalau dinamika itu ada banyak. Jadi, dinamika itu, DPRD punya forum reses yang masuk di pokok-pokok pikiran DPRD. Nah biasanya, yak karena semuanya bermuara pada besarnya APBD yang itu semua tidak mungkin bisa mengcover semuanya usulan dari dewan, maupun dari eksekutif, dan dari walikota atau yang namanya biasanya disebut *mider projo* dan macam-macam. Sehingga akhirnya dibuat skala prioritas. Lha ketika sudah masuk di skala prioritas artinya legislatif membuat skala prioritas bersama dengan eksekutif, kalau Badan Anggaran dengan TAPD maka itu muncul dinamika yang sangat dinamis. Artinya ramai yang membuat pembahasan Panjang kan ya itu. Ya terkadang ada yang harus diturunkan, ada yang harus ditambah dan sebagainya. Jadi, muncul dinamika yang sangat dinamis. Artinya terjadi saling menyampaikan argumennya masing-masing. Seramai apapun dinamika tersebut harus selalu ingat batas-batas APBD November selesai. Sehingga legislatif harus mencari kesepakatan skala prioritas itu ya sampai selesai dengan dibatasi waktu itu tadi. Artinya bisa sampai malam pembahasannya. Mungkin di Kota lain selain Surakarta di eksekutif adalah SKPD sering melakukan pendekatan tersendiri ke DPRD (Banggar) untuk meminta tambahan anggaran

6) Bagaimana mekanisme yang dilakukan legislatif untuk dapat memastikan bahwa keinginan rakyat benar-benar terwakilkan dalam hal penyusunan anggaran?

RPJMD itu kan Perda, Perda itu dulu dibuat dan disetujui oleh eksekutif dan legislatif itu berdasarkan masukan dari seluruh elemen masyarakat sebagai kerangka atau rel bahwa pembangunan Kota Surakarta lima tahun kedepan itu harus sesuai juga hasil-hasil musrenbang itu, lalu ada lagi pokok-pokok pikiran dewan, supaya kita bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat mestinya semua harus masuk. Tetapi persoalannya adalah APBD terbatas, kalau Kota Surakarta kan hanya 2T sekian. APBD Kota Surakarta sekitar 500-600 sekian. Nah bagaimana semuanya bisa terakomodir maka ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dan harus ada skala-skala prioritas yang legislatif cermati bersama. Misalnya usulan pembangunan gedung pertemuan warga oh ini dipandang belum prioritaaas, ada yang lebih prioritas pembangunan posyandu

balita. Sehingga tidak mungkin semua aspirasi masyarakat itu bisa terpenuhi dalam satu tahun anggaran. Tetapi kalau itu yang sesuai dengan RPJMD dan dulu waktu reses dan tidak semua reses bisa masuk maka akan dibuat dalam skala prioritas.

- 7) Apakah dalam setiap anggaran yang ditetapkan telah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat?

Yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat adalah yang masuk atau termuat dalam skala prioritas. Jadi pasti sudah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat

- 8) Bagaimanakah peranan komisi-komisi yang ada terkait dengan hubungan kerja dalam penetapan anggaran?

Komisi sangat berperan karena itu kan pembidangan artinya dengan dibagi perkomisi dan itu pembidangan dengan OPD-OPD di mitra kerjanya masing-masing maka akan lebih fokus. Maksudnya disana akan dibahas secara detail tentang RKA. Jadi RKA nya nanti misalnya sampai pada belanja administrasi seperti beli kertas atau beli macam-macam lainnya itu nanti dibahas dikomisi. Sehingga perannya komisi cukup signifikan dalam membantu badan anggaran dalam membahas. Karena kalau di badan anggaran dan TAPD tidak mungkin bisa sedetail itu. Komisi kan terbagi misalnya Komisi I bidang pemerintahan dan hukum, Komisi II hanya ada enam OPD atau dinas sehingga lebih fokus dan lebih detail.

- 9) Apakah ada keterkaitan antara anggaran yang ditetapkan dengan ideologi atau cita-cita partai politik pengusung anda?

Ya pasti, karena anggota DPRD dari partai politik manapun itu pasti ditugaskan oleh partainya untuk mewujudkan garis-garis perjuangan partainya. Kalau di PDIP itu punya piagam perjuangan partai yang mana piagam perjuangan partai itu disampaikan kepada masyarakat itu yang kalau ada anggota dewan atau kepala daerah menang itu akan dianggap sebagai janji. Yang dapat mewujudkan program partai itu adalah kader-kader partai yang ditugaskan di eksekutif sebagai kepala daerah dan juga yang ditugaskan di legislatif sebagai anggota dewan. Sehingga kalau Surakarta dianggap oleh masyarakat berhasil dibuktikan

PDIP mendapat kursi yang naik berarti masyarakat kan percaya. Sehingga yang terpilih ditugaskan sesuai garis perjuangan partai maka yang kami bahas itu pasti sesuai keinginan partai dan ideologi partai.

- 10) Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan?

Ada garis-garis perjuangan partai yang ditugaskan pada dewan terpilih, selain itu ada juga situasi dan kondisi masyarakat yang berjalan saat ini. Sehingga itu yang menjadi pertimbangan legislatif untuk mengambil kebijakan persetujuan didalam APBD. Misalnya tentang digaris perjuangan partai ada harus mewujudkan kesehatan yang murah bagi masyarakat nah itu misalnya kami wujudkan dalam bentuk biaya operasi dan sebagainya dan akhirnya juga diwujudkan dengan oh kalau swasta apapun atau yayasan tidak bisa free dan akhirnya harus diwujudkan dengan membuat rumah sakit sendiri-sendiri. Termasuk misalnya situasi dan kondisi perubahan tentang pendidikan yang saat ini menggunakan sistem zonasi yang merupakan mandate dari Undang-Undang. Maka otomatis legislatif juga sandingkan. Kalau itu mandat partai kan hanya pendidikan yang murah dimana itu diwujudkan dengan aturan baru adanya zonasi ya mestinya legislatif pikirkan untuk menambah SMP-SMP yang ada di Kota Surakarta. Misalnya SMPN 3 Surakarta pindah di Karangasem untuk menjawab sistem zonasi agar mencakup berbagai zonasi. SMPN 27 Surakarta dipindah ke Pajang, SMPN 5 dipindah ke Mojosongo. Jadi itu kan situasi dan kondisi yang berubah yang harus dijawab oleh legislatif dengan membangun SMP baru.

- 11) Bagaimana anda menanggapi angka SILPA yang tinggi?

Jadi SILPA itu harus dicermati dari berbagai aspek ada yang dari sisa pagu artinya contoh bangunan gedung yang dipagu 10M misalnya ternyata setelah dilelang hanya 9M itu kan berarti ada sisa 1M. Ada beberapa sisi SILPA itu disebabkan ada karena pagu atau hal-hal lain. Setelah kita melihat SILPA itu darimana kita cermati lagi berarti kalau 10M dilelang hanya sampai 9M dan itu terpenuhi volume dan specnya berarti itu kok sisanya masih banyak berarti perencanaannya kurang detail, kurang fokus. Karena hasil lelangnya sisanya 1M.

Misalnya sejak awal perencanaan akhirnya dipasang 9M 200 Jt begitu dilelang hanya 9M sisa 200 Jt itu adalah perenanaan yang efektif dan efisien. Tetapi kalau lebih berarti perencanaanya kurang bagus. Maka melihat SILPA tidak bisa melihat bagus atau buruknya tetapi harus dilihat sumbernya dulu darimana SILPA itu. Ada juga dari yang tidak terlaksana yang masuk ke SILPA. Semua sisa-sisa anggaran itu masuk ke SILPA. Misalnya contoh direncanakan membangun drainase panjang 500 meter lebar 1 meter anggarannya misal 2M legislatif setuju ada saat pembahasan. Tetapi pada pelaksanaannya kok tidak terlaksana, maka legislatif cermati dengan menanyai OPD atau dinas mengapa tidak terlaksana. Ternyata jawaban OPD kalau misal pembangunan terlaksanakan nabrak tembok rumah orang dan akan mengganti rugi banyak. Berarti perencanaannya kurang bagus. Mengapa sejak awal tidak dilihat ketika akan membangun drainase akan menabrak tembok warga. Maka sumber SILPA harus dilihat terlebih dahulu baru bisa memberikan penilaian. Ada orang yang bilang kalau SILPA nya banyak itu efisiensi ya tidak juga kita harus melihat darimana sumbernya.

- 12) Bagaimana pengawasan yang dilakukan DPRD dalam pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun 2017-2018?

Legislatif lihat yang kemarin dibahas lalu legislatif setuju. Setelah itu pada pelaksanaan legislatif juga melihat. Kalau di Komisi II tentang infrastruktur, berarti bisa meninjau ke lapangan. Misal apakah pembangunan jembatan sudah sesuai dulu lokasinya disini oh sudah sesuai misalnya. Panjangnya sekian sesuai perencanaan sudah sesuai atau tidak. Pengawasannya dilakukan pada saat pelaksanaan.

- 13) Apakah dengan kedatangan TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Kejaksaan Negeri Kota Surakarta mempengaruhi hubungan antara kedua lembaga?

Tidak mempengaruhi. Legislatif dan eksekutif tidak ada masalah TP4D masuk mengawasi ya silahkan saja dan tidak terasa terganggu.

- 14) Apakah menurut anda hubungan kerja antara legislatif dengan eksekutif dalam hal penganggaran telah maksimal?

Kalau maksimal yang tidak, karena legislatif dan eksekutif belum bisa menuruti keinginan masyarakat karena terbatasnya APBD.

Nama : **Bhimo Rizky Samudro S.E., M.Si., Ph.D**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Jabatan / Unit Kerja : **Dosen FEB Universitas Sebelas Maret (Pakar
Ekonomi Pembangunan)**
Hari dan tanggal : **Senin, 18 November 2019**

- 1) Apakah ada indikasi mengenai terjadinya *slack* terhadap rancangan yang diusulkan eksekutif pada penyusunan APBD Kota Surakarta tahun 2017-2018? Kalau istilahnya *slack* tidak sampai secara fisik pasti jelas pasti perbedaan antara eksekutif dan legislatif masalah kepentingan apalagi di Indonesia yang multipartai itu pasti kecenderungannya ada, cuman untuk kemudian dimaping satu-satu itemnya apa tidak bisa dipastikan. Tetapi polanya antara eksekutif dan legislatif di Indonesia itu seperti itu. Meskipun Kota Surakarta total untuk eksekutif itu PDIP legislatifnya juga PDIP. Nah meskipun dominan PDIP tetap pasti ada *slack* diantara keduanya. Untuk Kota Surakarta homogenitasnya lebih tinggi.
- 2) Apakah diantara DPRD dan Pemerintah Daerah ada pihak yang lebih dominan? Untuk Kota Surakarta jelas pemerintah yaitu eksekutifnya yang lebih dominan. Jadi homogenitas di eksekutif dengan dilegislatif itu berbeda. Homogenitas di eksekutif lebih tersentral dan terkontrol. F.X. Rudi Hadyatmo menang hampir 70-80% otomatis seluruh jajarannya kekuatannya ada di kekuatan homogen yang sama yaitu PDIP. Dari sisi legislatif meskipun mendominasi tetap ada warna-warna lain disitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih dominan untuk jangkauan Kota Surakarta walaupun semuanya PDIP tetap eksekutif yang lebih dominan.
- 3) Bagaimana seharusnya Eksekutif dan Legislatif dalam menyikapi tingginya SILPA?
 Dari sisi eksekutif dan legislatif mestinya yang pertama adalah ideal didaerah Surakarta kondisi permasalahannya apa, kondisi keunggulannya apa pasti adalah suapnya itu. Itu harus ada kesesuaian pemahaman dulu. Cuman untuk Kota Surakarta ini unik. Contoh dalam masalah eksekutif dan legislatif untuk Kota

Surakarta dalam penentuan UMK atau upah itu jarang sekali terjadi konflik. Karena homogen, tersentral atau terkontrol. Gampangnya Kota Surakarta dibandingkan dengan Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali memang semuanya sama-sama menang PDIP tetapi untuk Kota Surakarta ini dia punya kultur tersendiri. Missal untuk menentukan hal-hal seperti ini lebih banyak komprominya. Jadi yang membedakannya adalah kulturalnya.

4) Apa saja harapan kedepan terhadap hubungan kelembagaan tersebut?

Kalau di Kota Surakarta masalah kultural justru aspek kultural bukan sebagai aspek yang dikatakan kolot atau dikatakan lambat justru kompromi antara eksekutif dan legislatif untuk menyusun APBD ini bisa membuat APBD menjadi lebih lancar. Setelah yang pertama aspek kultural, yang kedua adanya homogenitas di eksekutif dan legislatif di Kota Surakarta ini membuat proses menjadi lebih lancar meskipun “apakah politik yang terjadi itu sehat atau tidak, demokratis atau tidak demokratis dan hal-hal yang lain” ya kalau itu harus berjalan dengan homogenitas dengan sentralisasi dalam warna yang sama yaitu merah ya diragukan.

Nama : Adityo Setiyowarman, M.M.,M.T.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan / Unit Kerja : Kabid Anggaran / BPPKAD Kota Surakarta
Hari dan tanggal : Selasa, 26 November 2019

- 1) Apa tugas dan fungsi Sub Tim TAPD (eksekutif) dalam hubungan kerja dengan DPRD (legislatif) mengenai proses penyusunan dan penetapan APBD?
Menyusun KUA-PPAS, menyusun APBD ke DPRD untuk dibahas dan disetujui sampai ditetapkan menjadi PERDA prosesnya full 3 bulan. TAPD juga melakukan pembahasan dengan misalkan tahun ini selesai tinggal bulan Desember, BPK masuk dibulan Januari pelaksanaan anggaran APBD tahun 2019 ini dipertanggungjawabkan dengan PERDA nah TAPD sama juga rapat dengan DPRD untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 2) Terkait dengan fungsi anggaran, apakah hubungan antara eksekutif dengan DPRD dalam penyusunan APBD 2017-2018 telah berjalan dengan harmonis?
Mau tidak mau suka tidak suka harus berjalan harmonis antara kedua lembaga tersebut. Dasarnya UU No. 32 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Jika Walikota melalui Bapak Sekda sudah mengirim APBD tidak dibahas yang salah maka DPRD nya, gaji DPRD akan ditunda pencairannya, tetapi kalau walikota terlambat memberikan maka gaji walikota yang ditunda dicairkan. Maka oleh sebab itu harus harmonis.
- 3) Apakah dalam setiap tahapan penyusunan dan penetapan telah berjalan tepat waktu?
Sudah tepat waktu, manakala tidak tepat waktu didalam APBD ada dana insentif daerah syaratnya yaitu Opini WTP dan APBD nya tepat waktu, kalau daerah sudah WTP ada insentif dari pemerintah pusat berarti tata kelola nya sudah bagus, Kota Surakarta pernah mendapat sebesar 5M, 13M, 30M, yang terakhir 56M. itu terjadi manakala APBDnya tepat waktu dan mendapat opini WTP. Insentif di Kota Surakarta 100% untuk Pendidikan itu sudah kebijakan Walikota. Itu indikator harmonisnya yaitu ada PERDANYA dan tepat waktu.

4) Apakah diantara Pemerintah Daerah dan DPRD merasa ada pihak yang lebih dominan?

Tidak ada. Tetapi berdasarkan pada prinsip rasionalitas, efisiensi dan efektivitas.

5) Perihal apa saja yang dipersoalkan oleh DPRD dalam pembahasan APBD?
(manipulasi)

6) Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk dapat memastikan bahwa keinginan rakyat benar-benar terwakilkan dalam hal penyusunan anggaran?

Rapat dengan DPRD, DPRD membawa aspirasi nah aspirasinya itu harus dijujukan oleh DPRD. Usulan tk RT naik ke tingkat RW, aik lagi ke Forum SKPD jadi usulan bottom up dari masyarakat. Tetapi dinas juga punya Renstra 5 th. Dibahas bersama jadinya RKPD.

7) Bagaimana pengawasan yang dilakukan DPRD dalam penetapan APBD 2017-2018?

Berdasarkan peraturan perundang-undangan supaya teratur dan terarah.

8) Apakah dengan kedatangan TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Kejaksaan Negeri Kota Surakarta mempengaruhi hubungan antara kedua lembaga?

Tidak.

9) Apakah besar anggaran yang ditetapkan telah sesuai dengan sumber daya yang dimiliki?

Sudah sesuai.

10) Bagaimana anda memandang hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penetapan APBD 2017-2018?

Hubungan Kerja yang professional dan saling bersinergi untuk menciptakan APBD yang tepat sasaran dan sesuai bagi masyarakat.

Nama : Ibu Mila Yuniarti, S.T.,M.M.
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan / Unit Kerja : Kabid Penyusunan Program dan Pelaporan /
BAPPEDA Kota Surakarta
Hari dan tanggal : Jumat, 16 November 2019

1) Apa tugas dan fungsi TAPD (eksekutif) dalam hubungan kerja dengan DPRD (legislatif) mengenai proses penyusunan dan penetapan APBD?

Eksekutif dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan legislatif dalam hal ini adalah DPRD melalui Badan Anggaran bersama-sama membicarakan APBD mulai dari perencanaan sampai jadi anggaran. Setiap proses perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh TAPD, jadi ada kronologisnya dan tidak serta merta langsung terbentuk anggaran, kala eksekutif jelas untuk menyusun KUA-PPAS dan APBD.

2) Apakah dalam setiap tahapan penyusunan dan penetapan telah berjalan tepat waktu?

Sudah, cuman untuk APBD murni, kan APBD ada dua jenis murni dan perubahan untuk APBD murni dan perubahan idealnya pada saat nota penjelasan KUA-PPAS biasanya bareng, cuman menurut pemendagri murni itu kan KUA ditetapkan bulan Juli, kami di Bulan September atau awal Oktober maksimal. Karena, kami menunggu asumsi pendapatan dari pusat. Tetapi kalau times code dan penetapannya sesuai.

3) Apakah diantara Pemerintah Daerah dan DPRD merasa ada pihak yang lebih dominan?

Tidak sama saja tidak ada yang lebih dominan.

4) Dinamika atau faktor apa saja yang muncul selama pembahasan APBD?

Biasanya dinamika yang muncul itu kaitannya dengan evaluasi kinerja, biasanya dari dewan kan melakukan evaluasi kemudian mereka menanyakan prioritas dan tema pembangunan. Karena, yang mereka kawal Perda Namanya Perda evaluasi RPJMD.

- 5) Perihal apa saja yang sering dipersoalkan oleh DPRD dalam pembahasan APBD?

Biasanya penyamaan persepsi terhadap peraturan sehingga mereka setiap pembahasan KUA atau APBD mereka kadang konsultasi ke Mendagri atau Kemenkeu ataupun kementerian terkait.

- 6) Bagaimana mekanisme yang dilakukan eksekutif untuk dapat memastikan bahwa keinginan rakyat benar-benar terwakilkan dalam hal penyusunan anggaran?

Kami mengawal 2 hal; 1) hasil Musrenbang, 2) pokok pikiran DPRD. Kami mensinkronkan antara pokok pikiran dan hasil Musrenbang.

- 7) Apakah pihak DPRD ikut menentukan program dan penggunaan alokasi anggaran?

Pihak DPRD ikut menentukan pada saat rapat. Karena; 1) Kami sudah menyepakati Perda RPJMD itu adalah bentuk kesepakatan program apa yang dilakukan selama lima tahun. 2) pada saat KUA-PPAS dewan ikut mengawal evaluasi dan rincian pemanfaatan anggaran apakah masih relevan dengan dokumen-dokumen yang telah disepakati dalam RPJMD pada setiap tahapan baik KUA-PPAS maupun RAPBD.

- 8) Bagaimanakah peranan antar SKPD yang terkait dengan hubungan kerja dalam penetapan anggaran?

Kami sekarang sudah menggunakan SIMDA integrated yang dimana itu sudah terintegrasi mulai dari perencanaan dalam hal ini Renstra kemudian narik kerancangan RKPD kemudian rancangan awal Renja sampai RKA nya itu adalah pada saat itu bergulir pasti OPD kan mengajukan, angkanya pasti akan kami sesuaikan dengan kapasitas keuangan, TAPD membahas dengan perangkat daerah paparan dengan TAPD. Ya sama kalau missal kita rumah tangga missal uang yang dimiliki sekian padahal butuhnya sekian, kira-kira mana yang didahulukan.

- 9) Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan?

Yang pertama adalah harus berdasarkan regulasi Pemendagri lalu evaluasi kinerja pastinya, yang terakhir kondisi aktual berdasarkan hasil musrenbang dan pokok pikiran DPRD.

- 10) Apakah dengan kedatangan TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Kejaksaan Negeri Kota Surakarta mempengaruhi hubungan antara kedua lembaga?

Sejauh ini tidak malah membantu, TP4D tidak membantu pada porsi perencanaan dan penganggaran tetapi membantu bahwa pengendalian pelaksanaan dapat sesuai waktu, dapat sesuai dengan perencanaannya.

- 11) Bagaimana anda menanggapi angka SILPA yang tinggi?

SILPA yang tinggi itu bukan berarti kinerja yang buruk. Karena kinerja dan uang adalah dua hal yang berbeda. Pada saat indikator kinerja itu masih dapat mencapai kinerja dan target dalam RPJMD itu berarti kami tidak gagal. Posisi SILPA itu kadang ada karena efisiensi proses pengadaan barang dan jasa.

- 12) Bagaimana anda memandang hubungan kerja Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penetapan APBD 2017-2018?

Hubungan kerjanya sangat solid. Jadi dewan memberi kritikan kepada eksekutif tetapi tidak mengkritik negative tetapi dalam hal membangun kinerja kami yang lebih baik. Tetapi dewan juga dapat menerima argumentasi selama kami berbasikan evaluasi kinerja dan target kinerja yang sudah disepakati.

- 13) Apa saja harapan ke depan terhadap hubungan kelembagaan tersebut?

Ke legislatif kami berterimakasih atas segala kritikan, masukan dan tanggapan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kami di eksekutif. harapan kami cuman satu kritikan itu dapat membangun kinerja kami agar lebih baik karena kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif yang solid harapannya mencapai kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta. Apabila kita tidak solid APBD molor maka pembangunan akan molor yang terkena dampak adalah masyarakat.

Nama : Bapak Ir. Ahyani, M.A.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan / Unit Kerja : Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD / Pemerintah
Kota Surakarta
Hari dan tanggal : Kamis, 28 November 2019

1) Apa tugas dan fungsi TAPD (eksekutif) dalam hubungan kerja dengan DPRD (legislatif) mengenai proses penyusunan dan penetapan APBD?

TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah (Bappeda), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (BPPKAD) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2) Apakah dalam setiap tahapan penyusunan dan penetapan telah berjalan tepat waktu?

Tahapan penyusunan dan penetapan telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Proses pembahasan dan sinkronisasi antara OPD dan TAPD, penyusunan KUA PPAS oleh Eksekutif untuk diajukan dan dibahas bersama legislatif kemudian menjadi dokumen RAPBD. Jika proses tidak berjalan tepat waktu maka dikhawatirkan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pemerintahan akan terhambat.

3) Apakah diantara Pemerintah Daerah dan DPRD merasa ada pihak yang lebih dominan?

Tidak ada peran yang lebih dominan antara Pemda dengan DPRD. Posisi keduanya sebagai mitra kerja yang saling melengkapi.

4) Dinamika atau faktor apa saja yang muncul selama pembahasan APBD?

a. Dinamika yang bisa saja terjadi adalah adanya kebijakan dari pusat atau provinsi yang belum terakomodir dan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) sehingga perlu ada terobosan dalam mengakomodir kepentingan tersebut.

- b. Porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sehingga akan berpengaruh terhadap kapasitas keuangan daerah.
- 5) Perihal apa saja yang sering dipersoalkan oleh DPRD dalam pembahasan APBD?
- a. Berkaitan dengan posisi SILPA tahun perencanaan anggaran yang dibahas, apakah akan mengalami kenaikan atau penurunan dibanding tahun sebelumnya.
 - b. Terkait target pendapatan asli daerah (retribusi, pajak daerah) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - c. Target-target kinerja masing-masing urusan dalam pemerintahan daerah serta plafon anggaran untuk mencapainya.
 - d. Belanja-belanja prioritas yang akan mendukung visi misi Kepala Daerah sesuai dengan dokumen RPJMD.
- 6) Bagaimana mekanisme yang dilakukan eksekutif untuk dapat memastikan bahwa keinginan rakyat benar-benar terwakilkan dalam hal penyusunan anggaran?
- a. Proses/mekanisme penyusunan anggaran sudah dimulai dalam tahap Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbangkot dimana proses-proses tersebut juga diikuti oleh perwakilan masyarakat, stakeholder, anggota DPRD serta perangkat daerah.
 - b. Alat bantu penyusunan anggaran berupa system perencanaan yang sudah terintegrasi mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan perangkat daerah serta aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses DPRD dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang juga akan diinput dalam system perencanaan terintegrasi.
- 7) Apakah pihak DPRD ikut menentukan program dan penggunaan alokasi anggaran?
- Program kegiatan direncanakan berdasarkan dokumen perencanaan yang sudah disusun sebelumnya yaitu Dokumen RKPD dan Dokumen Renja Perangkat Daerah. DPRD ikut dalam proses pembahasan APBD terutama berkaitan dengan

kebijakan berdasarkan ketersediaan anggaran. Jika anggaran yang ada terbatas maka alokasi anggaran untuk program kegiatan akan disesuaikan berdasarkan tingkat prioritas.

- 8) Bagaimanakah peranan antar SKPD yang terkait dengan hubungan kerja dalam penetapan anggaran?

SKPD menyusun program kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah berikut pagu indikatifnya. Sinkronisasi terkait penetapan anggaran akan dibahas dalam proses lebih lanjut bersama TAPD untuk menjadi dokumen KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Dokumen KUA PPAS akan dibahas antara TAPD bersama DPRD untuk menjadi rancangan APBD.

- 9) Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan?

- a. Target PAD (Pajak Daerah, Retribusi)
- b. Capaian kinerja perangkat daerah sesuai urusan pada tahun sebelumnya dan target kinerja yang harus dicapai tahun mendatang.
- c. Prioritas visi misi kepala daerah.
- d. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
- e. Kapasitas kemampuan keuangan daerah.

- 10) Apakah dengan kedatangan TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) Kejaksaan Negeri Kota Surakarta mempengaruhi hubungan antara kedua lembaga?

TP4D hadir untuk membantu Pemda dalam melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik agar berjalan sesuai dengan rencana dan optimal sesuai dengan anggaran yang digunakan. Tidak ada dampak yang negatif yang muncul dalam hubungan antara kedua lembaga.

- 11) Bagaimana anda menanggapi angka SILPA yang tinggi?

SILPA yang tinggi mengindikasikan perencanaan kegiatan yang tidak matang atau dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebaiknya memang harus dihindari angka SILPA yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun yang berjalan.

12) Bagaimana anda memandang hubungan kerja Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penetapan APBD 2017-2018?

Pemda dan DPRD bekerja sesuai dengan porsi masing-masing. Tidak ada permasalahan dalam penetapan APBD 2017-2018 dengan indikator bahwa APBD ditetapkan secara tepat waktu

13) Apa saja harapan ke depan terhadap hubungan kelembagaan tersebut?

Diharapkan bahwa Pemda dan DPRD tetap bermitra secara positif dalam penyusunan APBD, saling melengkapi dan melakukan tugas masing-masing secara professional sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan pembangunan kota dapat berjalan secara optimal.



Y.F. Sukasno, S.H.



Ir. Ahyani, M.A.



Bhimo Rizky Samudro S.E., M.Si., Ph.D



Mila Yuniarti, S.T.,M.M.



Adityo Setiyowarman, M.M.,M.T.